

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA JAYAPURA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019

Kevyn Wahyu Kelana Hia

kevynhia16@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The special autonomy for Papua is aimed at overcoming the problems of disparities between the Papua region and other regions in Indonesia. With this principle, the Special Autonomy Law expands the space for participation of indigenous Papuans in all fields of development. The law on special autonomy also opens space for improvement for a better future, as well as opens space for improvement in the context of fighting for the improvement of welfare, justice, peace, equality of rights, and to open up the development of identity, dignity, and dignity and dignity as a human. This study aims to assess the perception of the people of Jayapura City towards the implementation of Special Autonomy in the health sector for 2019 and assess the obstacles that occur during the implementation of the special autonomy in the health sector of Jayapura city. This research approach is descriptive quantitative, and data was collected by survey techniques.

The conclusions drawn from this study are first, the community has understood the implementation of Special Autonomy, secondly, the public health improvement program has not received a satisfactory response from the community, the third community strongly agrees with the free medical treatment program provided by the government, and the fourth is the obstacles that occur. there is a lack of understanding of the JAMKESPA program.

Keywords: Special Authonomy, Community Perception, Community Welfare, Health Service

ABSTRAK

Otonomi khusus Papua ditujukan untuk mengatasi masalah- masalah kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lain di Indonesia. Dengan prinsip itu UU otonomi khusus memperluas ruang gerak partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan. Undang – undang tentang otonomi khusus juga sekaligus membuka ruang bagi perbaikan untuk masa depan yang lebih baik, serta membuka ruang untuk perbaikan dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, persamaan hak, dan untuk membuka mengembangkan jati diri, harga diri, serta harkat dan martabat sebagai manusia .Penelitian ini bertujuan untuk menilai persepsi masyarakat Kota Jayapura terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan untuk tahun 2019 dan menilai hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Otonomi khusus bidang kesehatan kota Jayapura. Pendekatan penelitian ini kuantitatif deskriptif, dan data dikumpulkan dengan teknik survey.

Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah pertama, masyarakat telah memahami pelaksanaan Otonomi Khusus, yang kedua, program peningkatan kesehatan masyarakat belum mendapatkan respon yang memuaskan dari masyarakat, yang ketiga masyarakat sangat setuju dengan program pengobatan gratis yang diberikan pemerintah, dan yang keempat hambatan yang terjadi adaah kurangnya pemahaman terhadap program JAMKESPA.

Kata Kunci :Otsus, Persepsi masyarakat ,Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Bidang Kesehatan.

I. Pendahuluan

Papua adalah salah satu provinsi terbesar dan terkaya di Indonesia, tidak sedikit sumber daya alam yang dihasilkan daerah ini, mulai dari minyak, batu bara, emas, tembaga, uranium sampai hasil laut bahkan pariwisatanya. Namun dari semua hasil sumber daya alamnya tidak satupun yang mampu merubah kehidupan sosial dan mengangkat strata orang asli Papua, ¹tercatat saat itu Papua masuk dalam daftar salah satu daerah miskin berdasarkan pulau yang berada di Indonesia, berbagai masalah yang dihadapkan oleh masyarakat Papua, mulai dari konflik horizontal sampai konflik vertikal yang menimbulkan banyak gejolak yang terjadi di Papua saat itu.

Pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan yang dimana bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penanggung jawab penuh atas masyarakatnya tidak bisa menjalankan tugasnya, dalam hal ini pemerintah lebih condong mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum. Pada era pembangunan Jawa sentris dimana pembangunan hanya berpusat pada daerah Jawa saja, banyak masalah yang terjadi di Papua. Pendekatan secara militer pun dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjawab permasalahan yang ada di Papua pada saat itu tetapi bukannya jalan keluar yang didapatkan melainkan timbulnya masalah baru yaitu terjadinya gejolak besar di Papua.

Kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di Provinsi Papua sulit berkembang dan optimal dengan kebijakan ekspansi militer serta konsep pembangunan sentralistik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Peningkatan pembangunan dalam berbagai sektor di Irian Jaya menjadi agenda utama pada masa pemerintahan di zaman reformasi.

Pemberian Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut dengan Otsus, yang diberikan kepada Papua sebagai salah satu konsep dari penyelenggaraan

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur> diakses pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 18.00 WIT

pemerintahan daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua terlegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut dengan UU Otsus Papua. Otonomi khusus Papua sejatinya ditunjukkan untuk mengatasi masalah- masalah kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu undang - undang otonomi khusus merupakan bentuk kepedulian dan simpati pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua khususnya penduduk asli Papua ras melanesia. Dengan prinsip itu UU otonomi khusus memperluas ruang gerak partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan.

Hingga sekarang ini sudah lebih 15 tahun status otonomi khusus Provinsi di Papua berjalan. Mulai pada tahun 2014 pemerintah memperkuat pembangunan dengan sistem Indonesia Sentris yaitu pembangunan tidak hanya berpusat pada daerah Jawa saja (seperti gambaran umum diatas) tetapi melainkan pembangunan secara merata ke pelosok-pelosok Indonesia seperti daerah timur khususnya Papua. Terdapat empat poin di dalam Penguatan Indonesia sentris salah satu dari empat poin tersebut adalah

1. Pembangunan Papua

- Peningkatan Kualitas Hidup rakyat Papua
- Pembangunan Infrastruktur Papua
- Meningkatkan Produktivitas Papua

Berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah menjadi penanda penting komitmen Pemerintah untuk terus memacu daya saing dan produktivitas. Secara khusus, pemerintah memberikan perhatian bagi daerah-daerah tertinggal melalui pendekatan pembangunan wilayah. Berbagai program yang dilakukan disana diharapkan dapat menggerakkan perekonomian,menciptakan

lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Tetapi masih banyak yang harus dilakukan pemerintah dan membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua ²karena sampai sekarang Papua masih menjadi salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya tetapi belum tercapainya tingkat kesehatan yang baik, Sehingga disini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana Persepsi masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam bidang kesehatan Kota Jayapura

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan penelitian survei, yaitu dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi/variabel yang timbul didalam masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.

II. Landasan Teori

Persepsi masyarakat

Sarlito W. Sarwono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak.

Otonomi Khusus

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur>

masyarakat. Daerah yang diberikan Otonomi Khusus salah satunya adalah Provinsi Papua dimana arti otonomi khusus menurut UU no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dalam bab I perihal ketentuan umum pasal 1 membatasi arti otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak – hak dasar masyarakat Papua.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006:5) adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Lebih lanjut menurut Midgley dalam Suud (2006:5) menjelaskan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur yaitu adalah pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

III. Pembahasan

Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Berkenaan dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui persepsi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi khusus sebagai tujuan dari Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura terutama pada bidang kesehatan. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat wilayah Kota Jayapura. Penelitian ini melibatkan 100 masyarakat dari 39 kelurahan di Kota Jayapura.

Hasil analisis data dengan memakai analisis deskriptif mengacu pada penggunaan skala Likert dengan bantuan program SPSS. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator dalam mengungkap persepsi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi khusus terutama pada bidang kesehatan. Pertama, pengetahuan tentang otonomi khusus, mencakup mengetahui mengenai otonomi khusus yang berlaku; pelaksanaan otonomi khusus dalam bidang kesehatan; pengetahuan program yang di biayai oleh otonomi khusus; kemudahan Pelayanan dengan adanya otonomi khusus; serta pendapat pelaksanaan otonomi khusus.

Persepsi Masyarakat Tentang Otonomi Khusus Bidang Kesehatan , memiliki skor terendah 67 dan skor tertinggi 131, Identitas kecenderungan tinggi rendahnya skor variabel persepsi masyarakat ditetapkan berdasarkan pada kriteria ideal. Berdasarkan skor data penilaian model Likert dengan rentang skor 1-5 untuk 29 butir pertanyaan, maka mean idealnya dapat dihitung dengan norma sebagai berikut :

$$ST \text{ (skor tertinggi)} = 29 \times 5 = 145$$

$$SR \text{ (skor terendah)} = 29 \times 1 = 29$$

$$M = \frac{1}{2} (ST+SR)$$

$$= \frac{1}{2} (145 + 29) = 87$$

$$SB = 1/6 (ST-SR)$$

$$= 1/6 (145 - 29) = 19,33$$

Maka untuk mengetahui kecenderungan variabel persepsi masyarakat didasarkan atas skor ideal dengan ketentuan sebagai berikut :

$X \geq M + 1,5 SB = X \geq 115,995$ adalah kategori sangat tinggi

$M + 0,5 SB < X < M + 1,5 SB = 96,665 < X < 115,995$ adalah kategori tinggi

$M - 0,5 SB < X < M + 0,5 SB = 77,335 < X < 96,665$ adalah kategori sedang

$X < M - 0,5 SB = X < 77,335$ adalah kategori rendah

Tabel 2.1
Kategori Persepsi Masyarakat

Skor	Kategori	Jumlah Masyarakat
$X \geq 115,995$	Sangat Tinggi	10
$96,665 < X < 115,995$	Tinggi	54
$77,335 < X < 96,665$	Sedang	32
$X < 77,335$	Rendah	4

Berdasarkan ketentuan di atas maka masyarakat yang memiliki skor persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan yang rendah sebanyak 4 masyarakat atau 4 % , yang termasuk kelompok sedang 32 masyarakat

atau 32 %, yang termasuk kelompok tinggi 54 orang atau 54 %, dan yang termasuk kelompok sangat tinggi 10 orang atau 10 %.

Mean observasi (M) 101,02 terletak pada $M_i - S_{Bi}$ s/d $M_i + S_{M} + 0,5 S_{B} < X < M + 1,5 S_{B}$ atau pada rentang skor 96,665 sampai dengan 115,995. Hal ini mempunyai arti bahwa persepsi masyarakat rata-rata tergolong dalam kategori tinggi.

Hambatan dan Kesulitan dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Pada Bidang Kesehatan Tahun 2019

Sejalan dengan paparan hasil survey, menunjukkan ada beberapa hambatan atau kesulitan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura terutama pada bidang kesehatan melalui program JAMKESPA. Namun, dilihat dari segi usia muda diantara 17-25 tahun adalah rentang usia yang mengetahui program JAMKESPA sebagai otonomi khusus bidang kesehatan, hambatan yang terjadi pada usia produktif dan usia tua dengan kategori 26-35 tahun sampai dengan usia 55 tahun dan berharap sosialisasi terhadap JAMKESPA ditingkatkan dan diperluas sebagaimana hasil survey menemukan 38% setuju dengan diadakannya sosialisasi tentang kesehatan di Kota Jayapura.

Hambatan lain juga dilihat dari mereka yang memiliki tingkat pendidikan seperti tamatan SMP yang masih netral akan program JAMKESPA, selain itu masih kurangnya pengetahuan dari Ibu rumah tangga dan pedagang terhadap program JAMKESPA. Mengingat provinsi Papua harus di berikan status otonomi khusus, berdasarkan undang – undang No. 21 Tahun 2001. Undang – undang ini tidak lahir begitu saja. Otonomi khusus Papua sejatinya ditunjukkan untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu undang-undang otonomi khusus merupakan bentuk kepedulian dan simpati pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua khususnya penduduk asli Papua ras melanesia. Otsus lahir sebagai jalan keluar untuk menciptakan *win – win situation*

antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI (NKRI) dan pemerintah RI yang tetap kokoh teguh mempertahankan integritas dan kedaulatan atas NKRI. Perlunya program JAMKESPA sebagai otonomi khusus bidang kesehatan diharapkan memperjuangkan perbaikan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, persamaan hak, dan untuk membuka mengembangkan jati diri, harga diri, serta harkat dan martabat sebagai manusia. Program JAMKESPA sebagai otonomi khusus bidang kesehatan juga membuka ruang untuk membangun kembali kepercayaan rakyat Papua yang kurang percaya, di akibatkan oleh kekecewaan mereka kepada pemerintah RI, dan sebaliknya membangun kembali kepercayaan pemerintah RI kepada rakyat Papua terutama Kota Jayapura.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Persepsi Masyarakat Kota Jayapura terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan tahun 2019 maka dinyatakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi data tentang pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan kota Jayapura adalah sebagai berikut: persepsi masyarakat yang mendapatkan skor terendah sebanyak 8 masyarakat atau 8 % , yang termasuk kelompok sedang 33 masyarakat atau 33 % , yang termasuk kelompok tinggi 35 orang atau 35 % , dan yang termasuk kelompok sangat tinggi 24 orang atau 24 % .dan diperoleh harga rerata (M) sebesar 17,37 Hal ini mempunyai arti bahwa pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan rata-rata tergolong dalam kategori tinggi.
2. Deskripsi data peningkatan program kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut : persepsi masyarakat yang mendapatkan skor terendah sebanyak 4 masyarakat atau 4 % , yang termasuk kelompok sedang 32 masyarakat atau 32 % , yang termasuk kelompok tinggi 57 orang atau 57 % , dan yang termasuk kelompok sangat tinggi 7 orang atau 7 % dan diperoleh harga rerata (M)

sebesar 69,38. Hal ini mempunyai arti bahwa peningkatan program kesehatan masyarakat rata-rata tergolong dalam kategori tinggi.

3. Deskripsi data pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut : persepsi masyarakat yang mendapatkan skor terendah sebanyak 6 masyarakat atau 6 % , yang termasuk kelompok sedang 36 masyarakat atau 36 % , yang termasuk kelompok tinggi 41 orang atau 41 % , dan yang termasuk kelompok sangat tinggi 17 orang atau 17 % dan diperoleh harga rerata (M) sebesar 14,27. Hal ini mempunyai arti bahwa peningkatan program kesehatan masyarakat rata-rata tergolong dalam kategori tinggi.
4. Deskripsi data variabel Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan adalah sebagai berikut : persepsi masyarakat yang mendapatkan skor terendah sebanyak 4 masyarakat atau 4 % , yang termasuk kelompok sedang 32 masyarakat atau 32 % , yang termasuk kelompok tinggi 54 orang atau 54 % , dan yang termasuk kelompok sangat tinggi 10 orang atau 10 % . dan diperoleh harga rerata (M) sebesar 101,02. Hal ini mempunyai arti bahwa Persepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi khusus bidang kesehatan rata-rata tergolong dalam kategori tinggi.
5. Berdasarkan karakteristik sosial masyarakat, rata-rata usia 17-25 tahun adalah usia terbesar yang mengetahui tentang penyelenggaraan otonomi khusus bidang kesehatan, terutama program JAMKESPA. Rata-rata pendidikan tamat SMA/Sederajat adalah tingkat pendidikan yang mengetahui penyelenggaraan otonomi khusus bidang kesehatan. Adapun wiraswasta dan nelayan adalah pekerjaan yang kerap berhubungan langsung dengan JAMKESPA (Jaminan Kesehatan Papua) yang memudahkan masyarakat asli Papua mendapatkan pelayanan kesehatan.

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sosialisasi JAMKESPA perlu ditingkatkan dan diperluas melalui beberapa jaringan contohnya lingkungan RT/RW, Tokoh adat, pemuka agama bahkan

bisa melalui media sosial juga agar program tersebut bisa lebih dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Jayapura.

2. Fasilitas, pelayanan dan program kesehatan yang sudah mendapatkan respon baik dari masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan semakin baik.
3. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi khusus dengan jumlah sampel yang lebih banyak, atau dilakukan pada pusat penelitian yang lebih luas dengan metode yang berbeda

Daftar Pustaka

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/garis-kemiskinan-di-kota-jayapura-papua-2005-2013> diakses Pada tanggal 1 februari 2019, Pukul 16.00 WIT

Kaisiepo.(2014). *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Yang Semakin Tidak Menentu*.Jayapura: Harian Cenderawasih Pos

Purnomo, E. P. (2017). The Policy Implementation . *Journal of Governance and Public Policy*.